

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2013)
- A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997)*, (Bandung: Mandar Maju, 2010)
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2018)
- J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993)
- J.J. Brugink, *Rechtsreflecties, Alih Bahasa Arif Sidharta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005)
- M.A. Moegni Djojodiharjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982)
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah, & Perizinannya*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011)
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003)
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016)
- Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum "Informasi Menyesatkan (Misleading Information) Dalam Prospektus Go Public"*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2018)
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Jurnal

- Erizon Kairunsyah, Hasim Purba, Sunarmi, Rosnidar Sembiring, “Kedudukan Hukum Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Pembayaranannya Dilakukan Secara Bertahap Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1650 K/Pdt/2015)”, Vol. 02, No. 02 (2021)
- Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5, (2018)
- Iga Gangga Santi Dewi, “Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah”, Vol. 5. No. 2, (2010) DOI: <https://doi.org/10.15295/pandecta.v5i2.2294>
- Irfan Iryadi, “Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara”, *Negara Hukum*, Vol.11, No. 1, (2020)
- Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, dikutip oleh Yuanita Puspitasari. “Penyimpangan Klausula Baku yang Terdapat Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Rumah)”, *Notaire*, Vol. 3, No. 2, (2020) DOI: 10.20473/ntr.v3i2.20555
- Nixon G. L. Osingmahi “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 2 (2015)

Hasil Penelitian

- Siti Nurhidayati, “Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/PDT/2017)”. Tesis, Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Srg

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pdt./2020/PT BTN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3753 K/Pdt/2020

Website/Internet

Asriman A. Tanjung, “Tata Cara Pengecekan Sertifikat dan Persyaratannya”,
<https://asriman.com/tata-cara-pengecekan-sertifikat-dan-persyaratannya/>,
diakses pada 20 Desember 2022

Guru Ekonomi, “Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli”.
<https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-perjanjian-menurut-para-ahli/>
diakses pada 1 November 2022

Tim Yuridis.id, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”.
<https://yuridis.id/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2016-tentang-pemberlakuan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-mahkamah-agung-tahun-2016-sebagai-pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan/>
diakses pada 1 November 2022

Wilson Pompana, “Kedudukan PPJB dalam Jual Beli Tanah”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-hukum-PPJB-dalam-proses-jual-beli-tanah-lt6086d9ebd6b6d> diakses pada 1 November 2022

Referensi Lain-Lain

Universitas Pelita Harapan, *Standart Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022)